

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh kesejahteraan tanpa terkecuali. Mengacu pada uraian pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan bahwa : *“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”*. Dalam kutipan tersebut dijelaskan bahwa sejatinya kesejahteraan adalah hak milik semua orang. Indonesia adalah negara agraris dengan 257 juta penduduknya yang menggantungkan kesejahteraannya pada sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik BPS, No74/11/Th. XIV, 7 November 2018 hampir setengah dari penduduk Indonesia bermatapencaharian di sektor pertanian.

Tabel 1.1

Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan

Utama Tahun 2017-2018 (juta orang)

Lapangan Pekerjaan	Tahun	
	2010	2011
Pertanian	41,49	39,33
Industri	13,82	14,54
Konstruksi	5,59	6,34
Perdagangan	22,49	23,40
Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5,62	5,08
Jasa Kemasyarakatan	15,96	16,65
Lainnya *)	1,50	1,70
Jumlah	108,21	109,67

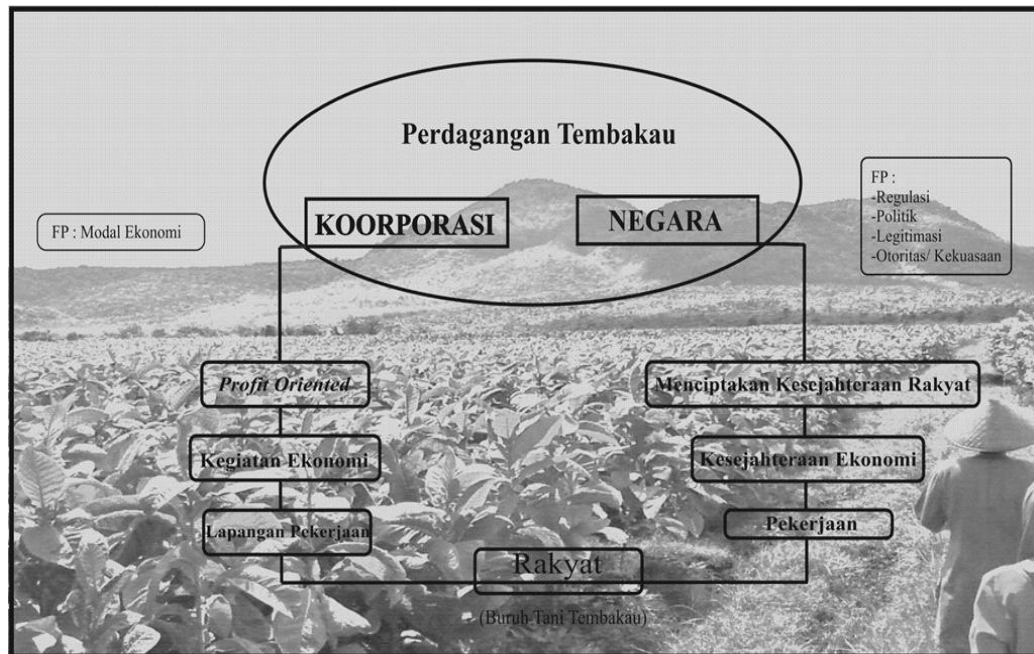
*) Lapangan pekerjaan utama/ sektor lainnya terdiri dari Sektor Pertambangan, Listrik, Gas, dan Air

Dengan demikian jaminan perlindungan terhadap sektor yang menjadi andalan 39,33 juta orang semestinya diakomodir oleh pemerintah. Penyelamatan sektor pertanian dalam negeri tengah menjadi isu penting, mengingat kondisi komoditas dalam negeri dari segala sektor mulai terancam dengan munculnya produk-produk asing ke Indonesia. Hal ini menyebabkan produk lokal terpaksa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri atau produk impor.

Tembakau merupakan salah satu produk asli negeri yang perlu dilindungi.

Kemunculan tembakau rakyat seringkali dianggap sebagai kesempatan ekonomi bagi masyarakat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa peran tembakau bagi masyarakat Indonesia cukuplah besar, hal ini disebabkan karena aktivitas produksi dan pemasarannya yang melibatkan peran sejumlah masyarakat. Pertanian tembakau muncul atas kebutuhan dua aktor yang sama-sama memiliki posisi kuat, yaitu industri rokok (korporasi) dan negara. Korporasi dengan faktor produksinya berupa modal ekonomi, memiliki kepentingan untuk mendapatkan *profit* sebanyak mungkin karena pada hakekatnya korporasi bersifat *profit oriented*. Untuk mencapai tujuannya korporasi harus menciptakan kegiatan ekonomi, salah satunya adalah melalui perdagangan. Perdagangan berimplikasi terhadap terciptanya posisi-posisi kerja. Untuk mengisi posisi-posisi tersebut korporasi membutuhkan tenaga kerja yang direkrut dari masyarakat. Bagan di bawah ini akan menjelaskan secara lebih jelas hubungan antara korporasi, negara dan pemerintah khususnya dalam pertanian tembakau:

Gambar 1.1
Pertanian Tembakau



Sumber : Hasil Analisis

Kepentingan negara seringkali kontradiktif dengan kepentingan korporasi. Negara memiliki kewajiban penting yakni menciptakan kesejahteraan sosial bagi warganya. Berbekal regulasi, legitimasi, kekuatan memaksa, otoritas dan kekuasaannya, negara berkepentingan untuk menciptakan kesejahteraan sosial, salah satunya mencakup kesejahteraan ekonomi. Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan cara penyediaan lapangan kerja yang memadai bagi warga. Korporasi mendapatkan porsi atau ruang untuk berkembang oleh pemerintah dalam rangka penyedia lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Dalam titik inilah hubungan saling menguntungkan tersebut terjadi. Disatu sisi negara dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya, di sisi lain kebutuhan koorporasi akan tenaga kerja dapat terpenuhi.

Temanggung menjadi salah satu daerah penyuplai tembakau utama di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Temanggung, luas areal tanaman tembakau pada tahun 2018 tercatat 14.582,15 hektar dan produksinya mencapai 7.976 ton. Areal penanaman ini tersebar di lereng gunung Sumbing-Sindoro-Prahu dan areal persawahan. Angka produksi tembakau yang dihasilkan di Temanggung setara dengan 31% produksi tembakau di Jawa Tengah atau 26% dari total produksi tembakau nasional. Fatkhur Rohcman (dalam *Karakter Pertumbuhan, Ketahanan Terhadap Penyakit, dan Kadar Nikotin Beberapa Galur Tembakau Temanggung 2017 : Vol 8 No.3*) Menurut laporan dari Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, tembakau Temanggung menyumbang 70-80% terhadap total pendapatan petani. Temanggung setiap tahunnya menyediakan suplai tembakau bagi perusahaan- perusahaan rokok besar seperti Djarum, Bentoel, dan Gudang Garam. Tembakau Temanggung sendiri dianggap begitu penting karena berfungsi sebagai pemberi rasa dalam komposisi setiap satu batang rokok.

Industri hasil tembakau memiliki sumbangan besar terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor ini melibatkan baik langsung maupun tidak langsung tak kurang dari 237.500 orang. Mereka terdiri dari buruh penggarap sawah, petani tembakau, pengering tembakau, pembuat rokok kretek rumahan, pembuat rokok cerutu serta perajang tembakau dan pedagang tembakau. Penyerapan tenaga kerja dari sektor tembakau tersebut terdiri dari 136.176 petani pemilik dan 82.467 buruh tani. Luas lahan pertanian tembakau mendominasi wilayah Kabupaten Temanggung. Dari 20 kecamatan yang tersebar, 14

diantaranya merupakan areal penanaman tembakau. Perbandingan luas lahan tembakau bila dibandingkan dengan komoditi lain adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2

Total Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Temanggung Tahun 2018

No	Komoditas	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Kopi Robusta	8.919,73	4.807,89
2	Kopi Arabika	1.160,57	626,82
3	Cengkeh	1.308,06	163,11
4	Tembakau	14.537,15	6.373,99
5	Kakao	530,74	61,44
6	Kelapa	1.960,62	1.006,02

Sumber : Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Temanggung (2018)

Pertanian tembakau dilakukan dan diwariskan secara turun temurun. Tembakau memberikan kontribusi *trickle down effect* bagi masyarakat di sekitarnya, diantaranya; buruh tani, pedagang keranjang, pengrajang, pencari debog, pedagang asongan, penjual

makanan dan sebagainya. Dari data di bawah ini menunjukkan bahwa hampir setiap kecamatan di Kabupaten Temanggung bergantung pada sektor tembakau.

Tabel 1.3

Luas Tanaman dan Produksi Tanaman Tembakau dirinci per Kecamatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (ha)	Produksi (ton)
1	Parakan	812,00	381,64
2	Kledung	1994,00	598,20
3	Bansari	1215,00	620,15
4	Bulu	1629,00	1087,73
5	Temanggung	416,00	197,20
6	Tlogomulyo	1232,00	517,44
7	Tembarak	1142,00	520,68
8	Selopampang	411,95	165,98
9	Kranggan	-	-
10	Pringsurat	-	-
No	Kecamatan	Luas (ha)	Produksi (ton)
11	Kandangan	35,00	24,50
12	Kaloran	-	-
13	Kedu	400,00	220,00

14	Ngadirejo	1924,00	566,28
15	Jumo	300,00	149,55
16	Gemawang	-	-
17	Bejen	-	-
18	Candiroto	572,00	185,90
19	Tretep	1525,00	532,17
20	Wonoboyo	929,00	306,57
Total		14537,15	6073,99

Sumber: Temanggung dalam Angka 2018

Sebagai komoditas asli negeri dan komoditas yang berkontribusi besar dalam pendapatan negara, industri ini semakin hari semakin didera tantangan- tantangan yang tidak mudah. Pengadopsian kebijakan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah salah satunya adalah dengan diterbitkannya PP No.109 tahun 2012 yang secara perlahan akan membatasi bahkan berpotensi membunuh eksistensi tembakau lokal. Adanya kebijakan-kebijakan semacam itu mendorong munculnya gerakan protes sosial yang dilakukan oleh petani tembakau dari berbagai kecamatan di Kabupaten Temanggung. Tercatat sejak PP 109/2012 disahkan gerakan protes sosial yang diwujudkan dalam berbagai cara terus bergulir. Demonstrasi ribuan petani pun tak terbendung, dari kantor-kecamatan hingga DPR. Bentuk protes sosial lain yang dilakukan diantaranya mogok makan, mogok membayar pajak dan aksi bakar.

Dari permasalahan yang ada, sektor tembakau harus dipahami sebagai bagian dari sistem sosial politik yang ada sehingga tidak lepas dari problema krisis. Dengan kata lain, krisis yang terjadi di sektor tembakau seperti munculnya ketidakadilan dan lain sebagainya merupakan refleksi krisis yang terjadi pada tingkatan makro. Kebijakan PP No.109/2012 menjadi landasan beroperasinya cara-cara pengelolaan yang mengabaikan keadilan sehingga menimbulkan sebuah aksi protes sosial. Aksi terbesar sejauh ini dilakukan di Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, yang melibatkan hingga 15.000 massa yang terdiri dari petani dan keluarga petani tembakau. Kebijakan-kebijakan yang semakin menekan posisi petani tembakau menimbulkan isu berbau ekonomi politik dalam pertanian tembakau. Isu akan munculnya kepentingan asing dalam kebijakan PP No. 109 tahun 2012 membentuk opini publik termasuk petani tembakau yang gelisah akan nasibnya, mengingat tembakau adalah sektor andalan mereka. Respon atas kebijakan ini juga hadir dari berbagai elemen diantaranya LSM (Komunitas Kretek, Laskar Kretek, Komisi Nasional Penyelamat Kretek, Liga Tembakau dan sebagainya), Asosiasi Petani Tembakau (APTI), Pers, dan Media Sosial. Pihak-pihak ini tidak dipungkiri berperan dalam pembentukan opini publik dan menjadi elemen penggerak protes sosial yang dilakukan oleh petani tembakau. Gerakan protes sosial yang dilakukan petani bertujuan untuk mengkritisi maupun memprotes kebijakan yang mengancam kesejahteraan petani tembakau. Protes-protes yang disampaikan dalam gerakan tersebut merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat petani yang bersifat komunal terhadap kondisi yang terjadi. Protes sosial yang bersifat kolektif ini menuntut adanya perubahan kebijakan melalui demonstrasi dan *civil disobedience* (tidak mau membayar pajak, mogok makan,

memblokir jalan, aksi bakar).

Demo serupa sebenarnya telah dialami komoditas yang mengalami nasib yang kurang lebih sama sebelumnya, seperti komoditas kelapa sawit, cengkih dan garam. Berkedok alasan kesehatan, komoditas yang menjadi kekuatan ekonomi lokal ini dengan mudahnya di tumpas oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sendiri. Petani garam di Madura misalnya, harga garam pada masa itu mengalami anjlok disebabkan adanya isu mengenai pentingnya yodium bagi kesehatan yang mana zat tersebut tidak terdapat pada garam Madura. Aksi membuang garam pun di lakukan oleh petani garam di Madura sebagai bentuk ketidakpuasan atas pemerintah.

Pernyataan ahli lain seperti Race (1972) dalam Mustain (2007) (dalam Ariendi dan Kinseng, 2011: 13) menyatakan bahwa :

“Aksi perlawanan petani biasanya untuk memenuhi kepentingan materi dan untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa petani akan melakukan aksi atau perlawanan berpatokan dengan adanya insentif selektif dan petani akan menghitung waktu partisipasi mereka menurut insentif yang tersedia.”

Asumsi pendekatan politik ekonomi menyatakan bahwa gerakan perlawanan petani sebenarnya didasari oleh pertimbangan rasional individual (internal) para petani terhadap perubahan yang dikalkulasikan akan merugikan dan bahkan mengancam mereka atau, sekurang-kurangnya, perubahan ini dinilai menghalang-halangi usaha yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan taraf hiduppetani.

Dalam gerakan protes sosial sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Pengaruh dari faktor eksternal dapat berupa mobilisasi dari pihak-pihak luar yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut diantaranya LSM, pabrik rokok,

tokoh politik daerah dsb. Sedangkan faktor internal yang dapat mempengaruhi gerakan protes diantaranya adalah kondisi sosial dan ekonomi individu petani tembakau, faktor produksi, dan kesadaran kritis yang dimiliki petani tembakau. Faktor internal dalam sebuah gerakan protes sosial menjadi penting ketika sebuah bentuk protes merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri yang merasakan ancaman dari sebuah kebijakan.

Keinginan penulis untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian tembakau di Kabupaten Temanggung membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan melaporkan hasil penelitian tersebut dengan judul : **“Ekonomi Politik Pertembakauan di Kabupaten Temanggung”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalah yang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana posisi petani dalam kebijakan politik ekonomi pertembakauan di Kabupaten Temanggung?

Analisis mengenai posisi tawar petani dan kebijakan politik ekonomi pertembakauan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai pertimbangan perumusan kebijakan yang lebih berkeadilan di masa yang akan datang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana posisi petani dalam kebijakan politik ekonomi pertembakauan di Kabupaten Temanggung

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan diadakannya penelitian ini, maka manfaatnya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini secara teoritis merupakan sumbangan penting dalam menambah wawasan, khususnya dalam proses politik ekonomi pertembakauan di Kabupaten Temanggung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan perkembangan bagi ilmu pengetahuan mengenai politik ekonomi pertembakauan yang memberikan dampak pada semua pihak baik pemerintah, industri rokok, petani dan masyarakat lainnya.

1.4.2 Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah kota / kabupaten maupun provinsi di seluruh Indonesia (utamanya dengan wilayah penghasil tembakau) yang masih kurang begitu memahami kondisi petani tembakau serta seluruh kondisi industri hasil

tembakau didaerahnya. Supaya terwujud kesejahteraan antar semua elemen.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta ketajaman analisis berpikir peneliti dengan terjun ke lapangan secara langsung. Karena dengan terjun ke lapangan secara langsung peneliti menjadi paham apa yang sebenarnya terjadi bukan hanya menganalisis secara teoritik saja.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Sehingga masyarakat khususnya petani tembakau akan merasa terlindungi dengan adanya kebijakan yang berlaku.

1.5 Landasan Teori

Bagian pertama tinjauan pustaka ini adalah perspektif teoritikal dengan menjelaskan sejumlah teori dan konsep menurut berbagai perspektif. Bagian kedua merupakan perspektif empirikal yang merupakan uraian dan penjelasan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya meninjau beragam pandangan mengenai kebijakan, ekonomi dan gerakan sosial petani.

1.6 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian Kanthi Pamungkas Sari dan Retno Rusdijjati (2015) melakukan kajian tentang “*Persepsi Petani Tentang Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Temanggung*”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Exisiting petani tembakau di Kabupaten Temanggung baik secara sosial ekonomi maupun kultural masih pada kecenderungan menengah ke bawah. Meski kondisinya tidak sama, ketika mereka menjadi petani tembakau dilatarbelakangi tiga hal yang paling utama yakni tradisi keluarga atau pekerjaan yang diwariskan, tradisi masyarakat setempat dan kehendak diri sendiri karena dengan tingkat pendidikan dan ketrampilan yang terbatas mereka memilih untuk menjadi petani tembakau. Tata niaga di Kabupaten Temanggung adalah petani sebagai produsen akan dijual ke perantara (pedagang, pengepul, tengkulak, juragan) selanjutnya dibawa ke grader sebagai wakil dari pabrikan (industri rokok). Masing-masing grader akan membangun jaringan ke perantara baik secara eksklusif maupun tidak. Petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Namun dalam etika tata niaga, penentuan kualitas dan harga di tingkat perantara sering berbeda dengan yang ditentukan oleh grader sebagai wakil pabrikan, semua resiko ditanggung petani. Persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung dianggap belum baik, maknanya belum berpihak pada kesejahteraan petani.

Kedua, penelitian Andrie Afrianto (2012) melakukan kajian tentang “*Respon Petani Tembakau terhadap Kegiatan Pengembangan Model Usahatani*”

Partisipatif (PMUP) di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung”. Dalam penelitian ini kegiatan PMUP oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tambahan pendapatan tanpa mengorbankan warisan budaya pengolahan tembakau, sembari mengurangi dampak kerusakan lahan akibat pengolahan tembakau. Hal ini memerlukan partisipasi dan kemauan para petani untuk mendukung penerapan program tersebut di lahan mereka. Para petani menyatakan bahwa kondisi kehidupan mereka tidak memungkinkan untuk dapat mendukung program PMUP, kondisi tersebut meliputi kondisi sosial-ekonomi, kondisi lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan, kinerja kelompok tani yang rendah, rendahnya daya saing PMUP terhadap sistem lama dan rendahnya kinerja pihak institusi. Lahan pertanian dan pengelolaannya bagi para petani adalah sumber pendapatan dan kehidupan mereka, sehingga kesediaan para petani untuk melaksanakan PMUP di lahannya sangat dilatarbelakangi cara pandang, persepsi, dan pengetahuan petani tentang keuntungan, kerugian, dan resiko yang dihadapinya apabila melaksanakan PMUP dibandingkan dengan budaya dan pola tanam yang sebelumnya telah mereka laksanakan dalam jangka waktu lama, yang pada tahap selanjutnya melahirkan respon petani untuk melaksanakannya atau tidak. Secara umum kondisi dan latar belakang petani, kondisi lingkungan sekitar dan pengaruh eksternal menjadi sumber timbulnya respon petani terhadap kegiatan PMUP. Kondisi yang dirasakan para petani dalam menanggapi kegiatan PMUP cenderung mengarahkan untuk tidak melaksanakan kegiatan PMUP, mulai dari kegiatan sosial ekonomi petani, kondisi lingkungan sekitar, kinerja kelompok tani, sistem agribisnis

PMUP yang tidak memiliki keunggulan dibandingkan budidaya pertanian sebelumnya, mulai proses input, pengolahan hingga pemasaran, kinerja kelembagaan dinas pengelola PMUP yang dirasakan kurang perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasinya serta paket kegiatan PMUP yang tidak terkonsep menyeluruh dan belum memberikan kompensasi yang sepadan bagi petani.

Ketiga, penelitian Anam Prasetyo (2016) melakukan kajian tentang *“Kajian Produktivitas dan Mutu Tembakau Temanggung Berdasarkan Nilai Indeks Erodibilitas dan Kepadatan Tanah”*. Kajian ini menjelaskan bahwa produktivitas tembakau di Temanggung harus terus ditingkatkan karena laju kebutuhan industri semakin tinggi. Namun seiring dengan upaya peningkatan produktivitas tembakau Temanggung, yang menjadi permasalahan adalah penurunan kesuburan lahan yang diikuti menurunnya produktivitas lahan. Menurunnya produktivitas tembakau di Temanggung disebabkan oleh degradasi lahan sebagai akibat dari budidaya tembakau yang intensif serta akibat erosi dan endemik penyakit. Tanaman tembakau merupakan tanaman yang spesifik, sehingga tiap daerah penghasil tembakau memiliki ciri khas dan mutu tembakau yang dihasilkan berbeda. Ciri khas tembakau ini dipengaruhi aspek lingkungan dan proses budidaya yang dilakukan petani. Kondisi lingkungan yang berpengaruh terhadap produksi dan mutu tembakau antara lain adalah kondisi tanah, iklim mikro (suhu dan kelembaban) disekitar pertanaman, tekstur, kelembaban tanah, dan curah hujan. Secara umum elevasi tempat yang tinggi menghasilkan tembakau dengan mutu yang tinggi, sedangkan

elevasi rendah menghasilkan tembakau dengan kualitas yang rendah. Demikian pula jika ditinjau dengan tekstur tanah, dimana wilayah berelevasi tinggi umumnya bertekstur lebih kasar dibandingkan wilayah berelevasi rendah. Tanaman tembakau di Kabupaten Temanggung dibudidayakan pada ketinggian tempat antara 500-1500 mdpl, kelerengan lahan bervariasi antara 8% - 45% dengan curah hujan antara 1500-3500 mm per tahun. Tingginya curah hujan dan dengan kemiringan lahan tertentu mengakibatkan terjadinya limpasan permukaan, sehingga berakibat terjadi erosi yang berakibat hilangnya unsur hara. Unsur hara tanah umumnya banyak terdapat pada lapisan atas tanah khususnya unsur N,P,K sebagai penyubur tanah sehingga aliran permukaan yang terjadi, selain membawa tanah tererosi juga membawa hara tanah keluar dari petak lahan pertanian. Kehilangan hara dari permukaan tanah merupakan salah satu akibat utama terjadinya erosi. Erosi sangat erat hubungannya dengan erodibilitas. Erodibilitas merupakan daya tahan tanah terhadap erosi yang mempunyai hubungan dengan kepadatan tanah, semakin tinggi kepadatan tanah suatu lahan maka erosi yang akan terjadi semakin besar sampai pada suatu titik optimum tertentu kemudian erosi yang terjadi akan semakin berkurang. Kepadatan berpengaruh terhadap produktivitas lahan namun tidak berpengaruh pada indeks mutu. Semakin tinggi kepadatan tanah maka semakin rendah produktivitas tembakau Temanggung. Erodibilitas tidak berpengaruh terhadap produktivitas lahan, namun berpengaruh terhadap indeks mutu. Semakin tinggi indeks erodibilitas maka semakin rendah indeks mutu tembakau Temanggung.

Keempat, penelitian Agus Ganjar Runtiko (2018) melakukan kajian tentang “*Sustainability Usahatani Tembakau: Perspektif Komunikasi Keluarga*”. Kajian ini menjelaskan dimana usaha tani tembakau satu sisi merugikan kesehatan karena berhubungan dengan berbagai penyakit degeneratif bagi penghisap rokok tetapi disisi lain usaha tani tembakau memiliki peranan menopang perekonomian terutama di sentra penghasil tembakau. Kajian ini melihat prospek sustainability usaha tani tembakau ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga petani tembakau. Asumsi yang dimunculkan adalah adanya peranan komunikasi keluarga yang melanggengkan nilai-nilai tertentu untuk sustainability. Alhasil, apabila komunikasi keluarga tidak berjalan baik, maka nilai-nilai yang seharusnya bertahan, juga tidak ada. Sustainability usaha tani tembakau merupakan sebuah kebutuhan bagi petani tembakau di sentra penghasil tembakau. Peran ekonomi tembakau belum dapat digantikan oleh tanaman lain hingga saat ini. Proyeksi mengenai sustainability usaha tani tembakau menjadi penting bagi para petani tembakau. Institusi keluarga memiliki peran besar dalam menjaga sustainability usaha tani tembakau. Nilai-nilai yang disosialisasikan, atmosfir sosialisasi, serta pola-pola komunikasi yang ada dalam keluarga merupakan faktor-faktor utama yang memiliki peranan untuk menjaga sustainability usaha tani tersebut. Proses sosialisasi dalam keluarga berhubungan dengan budaya masyarakat tempat mereka tinggal. Pada masyarakat petani tembakau dengan budaya tradisional, sosialisasi tampak lebih intensif dan dimulai sejak dini. Sedangkan pada keluarga yang tinggal di lingkungan masyarakat petani tembakau yang lebih modern, sosialisasi berlangsung kurang intensif. Dalam

penelitian ini mendeskripsikan situasi sosialisasi saat ini yang terjadi dalam keluarga-keluarga petani tembakau, serta lingkungan tempat tinggal mereka. Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dalam kajian sustainabilitas, diperlukan kajian yang lebih lama (riset longitudinal), sehingga bisa dilihat hasil dari situasi sosialisasi saat ini dimasa depan.

Kelima, penelitian Mamat H.S, S.R.P Sitorus, H. Hardjomidjojo, dan A.K Seta (2006) melakukan kajian tentang “*Analisis Mutu, Produktivitas, Keberlanjutan dan Arah Pengembangan Usahatani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ragam mutu dan produktivitas tembakau Temanggung, serta mempelajari sejauh mana pengaruh elevasi, arah lereng dan tingkat kemiringan lereng terhadap mutu dan produktivitas tembakau Temanggung, menilai keberlanjutan usaha tani tembakau Temanggung dan menyusun arahan pengembangan usaha tani tembakau Temanggung agar berkelanjutan. Kajian ini menjelaskan secara rinci bahwa tembakau Temanggung merupakan komoditas penting bahan baku industri rokok kretek, sumber pendapatan petani dan PAD Kabupaten Temanggung. Selain itu, tembakau juga menjadi pemicu pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan usaha tani seperti transportasi, penyediaan sarana produksi pertanian serta penyediaan lapangan kerja. Usaha tani tembakau Temanggung menghadapi 3 (tiga) masalah utama, yaitu: sifat tembakau Temanggung yang tergolong *fancy product*, struktur pasar yang *monopolistik* dan kondisi lahan usahatani yang beragam (beragam menurut elevasi,

arah lereng dan tingkat kemiringan lereng). Kondisi lahan tersebut mengakibatkan mutu tembakau menjadi beragam dan cenderung menurun bahkan mengancam keberlanjutan usaha tani tembakau. Penelitian ini dilaksanakan bulan Januari 2004 – Maret 2005 di sentra produksi tembakau Temanggung, yang memiliki perbedaan berdasarkan elevasi, arah dan kemiringan lereng digunakan analisis regresi berganda. Dalam menganalisis keberlanjutan usaha tani, digunakan multi atribut non-parametrik yang diolah dengan *multidimensional scaling* (MDS). Mutu dan produktivitas tembakau Temanggung cukup beragam. Elevasi dan arah lereng (*slope aspect*) merupakan faktor utama yang mempengaruhi mutu dan produktivitas tembakau Temanggung. Mutu tembakau yang ditanam pada lahan berelevasi di atas 1.000 m dpl, nyata lebih baik dibandingkan dengan mutu tembakau yang ditanam pada lahan yang berelevasi kurang dari 1.000 m dpl. Produktivitas tembakau yang ditanam pada lahan arah lereng ke timur nyata lebih tinggi dibandingkan dengan produktivitas tembakau pada lahan arah lereng ke timur laut dan utara. Tingkat kemiringan lereng tidak berpengaruh terhadap mutu maupun produktivitas tembakau. Indeks keberlanjutan usaha tani tembakau Temanggung termasuk dalam kategori cukup ($I_{kb} = 55,53$ pada skala keberlanjutan 0 – 100). Saat berbicara mengenai menurunnya mutu tembakau padahal tembakau Temanggung tergolong *fancy product* diikuti pula dengan sifat pasar tembakau Temanggung yang monopolistik, yaitu sebagian besar hanya dibeli oleh Pabrik Rokok Gudang Garam dan Djarum yang akhir-akhir itu peluang pasar tembakau Temanggung mengalami penurunan. Permintaan tembakau Temanggung sekitar 8.250 ton, yaitu Pabrik Rokok Gudang

Garam 3.750 ton, Pabrik Rokok Djarum 4.000 ton dan Pabrik Rokok lainnya 500 ton. Hal tersebut mengakibatkan posisi tawar petani semakin lemah, yang tercermin dari harga yang diterima petani. Sehubungan dengan itu, timbul pertanyaan apakah usaha tani tembakau Temanggung dapat berkelanjutan. Usaha tani berkelanjutan merupakan implementasi dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya menyinkronkan, mengintegrasikan dan memberi bobot yang sama terhadap tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek lingkungan hidup. Keberlanjutan usaha tani diukur dari stabilitas produksi. Dalam mempertahankan keberlanjutan usaha tani diperlukan introduksi teknologi. Teknologi introduksi akan diadopsi oleh 53% petani jika teknologi tersebut sudah dikenal didaerahnya, sedangkan 47% petani akan mengadopsi jika nilai tambah teknologi tersebut minimal relatif sama dengan teknologi yang ada dipetani. Beberapa kriteria yang dapat menjadi acuan pembangunan berkelanjutan, yaitu menyangkut aspek ekologi, ekonomi, sosial budaya serta hukum dan kelembagaan. Kriteria atau atribut setiap aspek tersebut merupakan hal penting dalam menilai status keberlanjutan secara cepat (*rapid appraisal*), dengan menggunakan metode multivariable non-parametrik yang disebut *Multidimensional Scaling* (MDS).

Keenam, penelitian Nuryanti, Subejo dan Budi Guntoro (2018) melakukan kajian tentang “*Bentuk dan Mekanisme Pemberdayaan Oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah*”. Kajian ini menjelaskan

tentang Asosiasi Petani Tembakau (APTI) merupakan organisasi non pemerintah yang berdiri karena kesamaan tujuan antar anggota yaitu meningkatkan kehidupan petani tembakau menjadi sejahtera. Dinamika perjalanan APTI dinilai dengan beragam persepsi karena banyaknya pihak-pihak yang berkepentingan. APTI dipandang sebagai organisasi yang independen. Secara umum, pemberdayaan petani tembakau yang dilakukan APTI Temanggung dipandang oleh para petani tembakau secara kelembagaan telah banyak memberi dampak positif bagi anggota, tetapi kemandirian secara individu petani tembakau yang mengarah pada ketahanan sosial ekonomi masih relatif rendah. Bentuk pemberdayaan petani tembakau yang dilakukan APTI Temanggung pada semua program pemberdayaan dapat dikategorikan sebagai fasilitasi dengan mekanisme pada masing-masing program berbeda-beda. Program-program pemberdayaan yang berhasil dibentuk dan dilaksanakan APTI Temanggung secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu: (a) program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, (b) program Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), (c) program pembimbingan pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan (d) program pemberdayaan utama APTI adalah advokasi regulasi pertembakauan. Semua bentuk pemberdayaan yang dilakukan APTI Temanggung adalah fasilitasi dengan mekanisme tiap program berbeda-beda.

Ketujuh, penelitian Bagas Makhrus Wicaksono (2019) melakukan kajian tentang *“Mobilisasi Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Dalam Upaya*

Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung". Kajian ini menjelaskan bahwa peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dapat dikatakan berhasil menjalin hubungan baik dengan petani, perusahaan (industri rokok), pemerintah, dan advokasi dengan perbankan sehingga petani dapat merasakan dampak langsung dengan diterimanya aspirasi petani oleh anggota dewan sehingga mampu menciptakan perlindungan hukum bagi petani, dan dengan adanya program Kredit Usaha Mandiri Petani (KUMP) dirasa dapat menstabilkan keuangan petani dari masa penanaman, proses hingga masa panen. Efektivitas perjuangan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung melihat dari perjuangan sebagai penghubung dengan perusahaan dan dalam memobilisasi masa dalam gerakan memperjuangkan RUU tembakau dapat dikatakan berhasil, dengan adanya peran APTI tersebut sebagai stakeholders antara perusahaan dan pemerintah membuat perusahaan membeli tembakau lokal terlebih dahulu sebelum membeli tembakau dari luar pulau Jawa, kemudian pemerintah ikut andil dalam memperjuangkan kepentingan petani, hal tersebut dapat dilihat dari peran anggota dewan Kabupaten Temanggung dalam mengaspirasikan keresahan petani tembakau kepada Gubernur Jawa Tengah yang saat itu diduduki oleh Ganjar Pranowo.

Kedelapan, penelitian Alfiana Rachmawati (2014) melakukan kajian tentang "*Ketergantungan Petani Tembakau Terhadap Sistem Kemitraan Perusahaan di Desa Bansari, Temanggung*". Kajian ini menjelaskan bahwa Mekanisme kemitraan

di Desa Bansari terbentuk atas pengajuan kerjasama oleh PT Djarum melalui kepala desa di tahun 2011. Petani yang dilibatkan dalam kemitraan ini adalah perwakilan anggota kelompok tani di Dusun Banaran sebanyak 18 orang. Pihak lain yang terlibat selama proses kemitraan ini adalah PT Djarum, kepala desa, kepala dusun, dan petani. Sedangkan pada tahun 2012, 18 petani memutuskan tidak lagi melanjutkan kemitraan dan memilih hanya bekerjasama dengan tengkulak saja. Posisi petani dalam hubungan kemitraan yang terjalin dengan industri rokok di tahun 2011, cenderung menyulitkan petani. Hal ini dikarenakan petani harus memproduksi tembakau sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mitra. Selain itu, petani juga sulit mengakses faktor produksi yang dibutuhkan. Jika hasil daun tembakau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka petani merugi karena daun akan dibayar jauh lebih rendah dibandingkan harga saat petani tidak bermitra. Oleh karena itu, pada tahun 2012, petani memilih tidak lagi bermitra dan hanya bekerjasama dengan tengkulak karena petani dapat dengan mudah menentukan faktor produksi tanpa harus terikat. Kemampuan akses petani juga lebih mudah, karena petani dapat memilih pihak manapun sesuai dengan relasi yang dimiliki. Kemitraan di Desa Bansari berakhir tahun 2011 dan petani sudah memilih tidak lagi melanjutkan kemitraan di tahun 2012. Bagi petani, perubahan kemampuan akses faktor produksi yang lebih mudah terjadi ketika tidak bermitra. Perubahan ini juga merubah perolehan keuntungan hasil panen daun tembakau yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan saat bermitra. Selain itu, ketergantungan petani terhadap pabrik pun berkurang karena petani hanya bekerjasama dengan tengkulak saat menjual hasil panen. Walaupun petani tidak

memperoleh sosialisasi secara formal, tetapi pertukaran informasi dengan tengkulak sudah cukup mewakili kebutuhan petani mengenai pembudidayaan tembakau.

Kesembilan, penelitian Riska Febryanti Mauna (2010) melakukan kajian tentang “*Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008-2010*”. Pembahasan dalam kajian ini adalah Kabupaten Temanggung yang identik dengan tembakau dan kota penghasil bahan baku rokok mendapatkan dana perimbangan dalam bentuk DBHCHT dengan jumlah dana yang selalu meningkat selama 3 tahun ini yaitu dari tahun 2008-2010. Namun kenyataan selama ini yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang ditopang dari dana perimbangan untuk membiayai program-program belum mampu berperan dalam meningkatkan pembangunan daerah. Apalagi pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen dan prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari DBHCHT berdasarkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal pelaksanaannya tetap mengacu dan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kegiatan atau proyek yang didanai DBHCHT baik fisik maupun non fisik sangat berkontribusi bagi masyarakat khususnya petani tembakau. Pada pelaksanaan kegiatan/proyek terdapat beberapa hambatan yaitu administratif, lapangan, maupun politik. Perlu dilakukan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT agar lebih memprioritaskan aspek kemanfaatan

yaitu dengan menyesuaikan antara kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan lebih mempertimbangkan kesesuaian antara output dan outcome sehingga dana yang terserap bisa bermanfaat, serta sinergi antar elemen demi suksesnya kegiatan atau proyek DBHCHT.

Berikut ini disajikan matriks ringkasan kajian dan penelitian terdahulu. Pada tabel berikut berbasis sumber penelitian (penulis, tahun dan judul) serta hasil-hasil penelitian.

Tabel 1.4

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
1	Kanthi Pamungkas Sari dan Retno Rusdijjati (2015), melakukan kajian tentang <i>“Persepsi Petani Tentang Tata Niaga Tembakau di Kabupaten Temanggung”</i>	Tata niaga petani di Kabupaten Temanggung adalah petani sebagai produsen akan dijual ke perantara (pedagang, pengepul, tengkulak, juragan) selanjutnya dibawa ke grader sebagai wakil dari industri rokok. Petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Persepsi petani tembakau tentang tata niaga tembakau di Kabupaten Temanggung dianggap

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		belum baik, belum berpihak pada kesejahteraan petani.
2	<p>Andrie Afrianto (2012) melakukan kajian tentang <i>“Respon Petani Tembakau terhadap Kegiatan Pengembangan Model Usahatani Partisipatif (PMUP) di Desa Tlahab, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung”</i></p>	<p>Pengembangan Model Usahatani Partisipatif (PMUP) oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui tambahan pendapatan tanpa mengorbankan warisan budaya pengolahan tembakau, sembari mengurangi dampak kerusakan lahan akibat pengolahan tembakau. Kondisi yang dirasakan para petani dalam menanggapi kegiatan PMUP cenderung mengarahkan untuk tidak melaksanakan kegiatan PMUP, mulai dari kegiatan sosial ekonomi petani, kondisi lingkungan sekitar, kinerja kelompok tani, sistem agribisnis PMUP yang tidak memiliki keunggulan dibandingkan bididaya pertanian sebelumnya, melalui proses input, pengolahan hingga pemasaran, kinerja kelembagaan dinas</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		<p>pengelola PMUP yang dirasakan kurang perencanaan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasinya serta paket kegiatan PMUP yang tidak terkonsep menyeluruh dan belum memberikan kompensasi yang sepadan bagi petani.</p>
3	<p>Anam Prasetyo (2016) melakukan kajian tentang <i>“Kajian Produktivitas dan Mutu Tembakau Temanggung Berdasarkan Nilai Indeks Erodibilitas dan Kepadatan Tanah”</i></p>	<p>Seiring upaya peningkatan produktivitas tembakau di Temanggung, yang menjadi permasalahan adalah penurunan kesuburan lahan yang diikuti menurunnya produktivitas lahan. Menurunnya produktivitas tembakau di Temanggung disebabkan oleh degradasi lahan sebagai akibat dari budidaya tembakau yang intensif serta akibat erosi dan endemic penyakit. Hal ini disebut dengan erodibilitas. Erodibilitas merupakan daya tahan tanah terhadap erosi yang mempunyai hubungan dengan kepadatan tanah suatu lahan maka erosi</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		<p>yang akan terjadi semakin besar sampai pada suatu titik optimum tertentu kemudian erosi yang terjadi akan semakin berkurang. Kepadatan berpengaruh terhadap produktivitas lahan namun tidak berpengaruh pada indeks mutu. Semakin tinggi kepadatan tanah maka semakin rendah produktivitas tembakau Temanggung. Erodibilitas tidak berpengaruh terhadap produktivitas lahan, namun berpengaruh terhadap indeks mutu. Semakin tinggi indeks erodibilitas maka semakin rendah indeks mutu tembakau Temanggung.</p>
4	<p>Agus Ganjar Runtiko (2018) melakukan kajian tentang <i>“Sustainable Usahatani Tembakau: Perspektif Komunikasi Keluarga”</i></p>	<p>Prospek sustainabilitas usaha tani tembakau ditinjau dari perspektif komunikasi keluarga petani tembakau, asumsi yang dimunculkan adalah adanya peranan komunikasi keluarga yang melanggengkan nilai-nilai tertentu untuk sustainabilitas. Sustainabilitas usaha tani tem-</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		<p>bakau merupakan sebuah kebutuhan bagi petani tembakau di sentra penghasil tembakau. Peran ekonomi tembakau belum dapat digantikan oleh tanaman lain hingga saat ini. Proyeksi mengenai sustainabilitas usaha tani tembakau menjadi penting bagi para petani tembakau. Institusi keluarga memiliki peran besar dalam menjaga sustainabilitas usaha tani tembakau. Nilai-nilai yang disosialisasikan, atmosfer sosialisasi serta pola-pola komunikasi yang ada dalam keluarga merupakan faktor-faktor utama yang memiliki peranan untuk menjaga sustainabilitas usaha tani tersebut.</p>
5	<p>Mamat H.S, S.R.P Sitorus, H. Hardjomodjodjo dan A.K Seta (2006) melakukan kajian tentang “<i>Analisis Mutu, Produktivitas,</i></p>	<p>Kajian ini menjelaskan secara rinci bahwa tembakau Temanggung merupakan komoditas penting bahan baku industri rokok kretek, sumber pendapatan petani dan PAD Kabupaten Temanggung. Selain itu, tembakau juga menja-</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
	<p><i>Keberlanjutan dan Arah Pengembangan Usahatani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah”</i></p>	<p>pemicu pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan usaha tani seperti transportasi, penyediaan sarana produksi pertanian serta penyediaan lapangan kerja. Usaha tani tembakau menghadapi 3 (tiga) masalah utama yaitu: sifat tembakau yang tergolong <i>fancy product</i>, struktur pasar yang monopolistik dan kondisi lahan usaha tani yang beragam (beragam menurut elevasi, arah lereng dan tingkat kemiringan lereng). Tembakau Temanggung tergolong <i>fancy product</i> namun bersifat monopolistik (hanya dibeli oleh industri rokok Djarum atau Gudang Garam), saat kondisi pasar menurun hal tersebut mengakibatkan posisi tawar petani semakin lemah, yang tercermin dari harga yang diterima petani.</p>
6	Nuryanti, Subejo dan Budi	Pemberdayaan petani tembakau yang dilaku

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
	<p>Guntoro (2018) melakukan kajian tentang “<i>Bentuk dan Mekanisme Pemberdayaan oleh Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Guna Mendukung Ketahanan Ekonomi Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah</i>”</p>	<p>kan APTI Temanggung dipandang oleh para petani tembakau secara kelembagaan telah banyak memberi dampak positif bagi anggota, tetapi kemandirian secara individu petani tembakau yang mengarah pada ketahanan sosial ekonomi masih relatif rendah. Program-program pemberdayaan yang berhasil dibentuk dan dilaksanakan APTI Temanggung secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu: (a) program pemberdayaan APTI DPD Jateng peduli pendidikan, (b) program Kredit Usaha Mandiri (KUMPT), (c) program pembimbingan, pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan (d) program pemberdayaan utama APTI adalah advokasi regulasi pertembakauan.</p>
7	<p>Bagas Makhrus Wicaksono (2019) melakukan kajian ten</p>	<p>Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dapat dikatakan berha</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
	<p>tang <i>“Mobilisasi Peran Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani Tembakau di Kabupaten Temanggung”</i></p>	<p>sil menjalin hubungan baik dengan petani, perusahaan (industri rokok), pemerintah dan advokasi dengan perbankan sehingga petani dapat merasakan dampak langsung dengan diterimanya aspirasi petani oleh anggota dewan sehingga mampu menciptakan perlindungan hukum bagi petani dan dengan adanya Program Kredit Usaha Mandiri Petani (KUMP) dirasa dapat menstabilkan keuangan petani dari masa penanaman, proses hingga masa panen.</p>
8	<p>Alfiana Rachmawati (2014) melakukan kajian tentang <i>“Ketergantungan Petani Tembakau Terhadap Sistem Kemitraan Perusahaan di Desa Bansari, Temanggung”</i></p>	<p>Hasil kajian ini menjelaskan mengenai kekurangan daripada sistem kemitraan petani tembakau. Posisi petani dalam hubungan kemitraan yang terjalin dengan industri rokok di tahun 2011, cenderung menyulitkan petani. Hal ini dikarenakan petani harus memproduksi tembakau sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mitra. Selain itu, petani juga sulit</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		<p>Mengakses faktor produksi yang dibutuhkan. Jika hasil daun tembakau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka petani merugi karena daun akan dibayar jauh lebih rendah dibandingkan harga saat petani tidak bermitra.</p>
9	<p>Riska Febryanti Mauna (2010) melakukan kajian tentang <i>“Analisis Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2008-2010”</i></p>	<p>Pengalokasian anggaran tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas masyarakat. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen dan prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari skala prioritas masyarakat. Oleh karenanya pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen dan prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan partisipatif. Perlu</p>

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Kajian
(1)	(2)	(3)
		<p>dilakukan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT agar lebih memprioritaskan aspek kemanfaatan yaitu dengan menyesuaikan antara kondisi dan kebutuhan masyarakat dan lebih mempertimbangkan kesesuaian antara output dan outcome sehingga dana yang terserap bisa bermanfaat serta sinergi antar elemen demi suksesnya kegiatan atau proyek DBHCHT.</p>

Penelitian pertama menjelaskan tentang tata niaga petani tembakau di Temanggung masih belum baik karena petani tidak memiliki kemampuan untuk menentukan kategori kualitas dan harga tembakau yang diproduksi. Kedua, Pengembangan Model Usahatani Partisipatif (PMUP) oleh pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, namun petani tidak dapat melaksanakannya karena kurang sesuai dengan kondisi sosial ekonomi petani, kondisi lingkungan sekitar petani, kinerja kelompok tani, sistem agribisnis PMUP yang dianggap tidak memiliki keunggulan, selain itu pihak dinas yang menangani hal

ini dirasakan kurang perencanaan, tidak adanya koordinasi pelaksanaan dan evaluasinya serta paket kegiatan PMUP yang tidak terkonsep menyeluruh dan belum memberikan kompensasi sepadan bagi petani. Ketiga, seiring upaya peningkatan produktivitas tembakau di Temanggung yang terus digenjot setiap tahunnya menimbulkan permasalahan seperti penurunan kesuburan lahan yang diikuti menurunnya produktivitas lahan, menurunnya produktivitas tembakau di Temanggung disebabkan oleh degradasi lahan sebagai akibat dari budidaya tembakau yang intensif serta akibat erosi dan endemik penyakit. Keempat, sebagai akibat peran ekonomi tembakau yang belum bisa digantikan sampai saat ini, menjadikan institusi keluarga memiliki peran besar dalam menjaga sustainabilitas usaha tani tembakau, nilai-nilai yang disosialisasikan, atmosfer sosialisasi, serta pola-pola komunikasi yang ada dalam keluarga merupakan faktor-faktor utama yang memiliki peranan untuk menjaga sustainabilitas usaha tani tersebut. Kelima, Tembakau Temanggung tergolong *fancy product* namun bersifat *monopolistik* sehingga menyebabkan daya tawar petani semakin lemah, persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan daya tawar petani tembakau di Kabupaten Temanggung sangat rendah. Keenam, adanya Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dianggap memberikan dampak positif bagi petani tembakau dengan program-program APTI yang berhasil dibentuk, yakni APTI peduli pendidikan, program Kredit Usaha Mandiri Pertanian Tembakau (KUMPT), program pembimbingan pembinaan dan pendampingan petani tembakau, dan program

pemberdayaan utama APTI yakni advokasi regulasi pertembakauan. Ketujuh, penilaian terhadap Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung yakni dapat dikatakan berhasil menjalin hubungan baik dengan petani, perusahaan (industri rokok), pemerintah, dan advokasi dengan perbankan sehingga petani dapat merasakan dampaknya secara langsung. Kedelapan, hasil kajian ini membahas mengenai kegagalan pola kemitraan pada petani tembakau, dengan sistem kemitraan yang diharapkan mampu membantu petani dalam meningkatkan mutu pertaniannya dalam jangka panjang serta membantu proses pemurnian tembakau melalui proses pendampingan dari sebelum tanam hingga pasca panen, namun berbanding terbalik dalam penelitian ini, petani justru sulit mengakses faktor produksi yang dibutuhkan, jika hasil tembakau tidak sesuai dengan kesepakatan, maka petani merugi karena daun akan dibayar jauh lebih rendah dibandingkan harga saat petani tidak bermitra. Kesembilan, alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Temanggung yang menekankan bahwa pemerintah daerah perlu menerapkan manajemen dan prinsip-prinsip dalam mengelola keuangan daerah khususnya yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berdasarkan aspek transparansi, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan partisipatif. Perlu dilakukan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan DBHCHT agar lebih memprioritaskan aspek kemanfaatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu mengenai Bargaining Politik Petani Tembakau pada Pilkada Temanggung 2018. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan yaitu berupa rendahnya daya tawar petani tembakau, model usaha tani tembakau yang belum terkonsep dengan matang, menurunnya produktivitas lahan pertanian tembakau, komunikasi keluarga guna mendukung sustainabilitas produksi tembakau, peran APTI sebagai stakeholder non pemerintah yang membantu melakukan advokasi untuk perlindungan kepada petani serta pelaksanaan programnya yang mendukung kelangsungan usaha tani tembakau, kegagalan sistem kemitraan pertanian tembakau, dan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Temanggung. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian ini, lebih memfokuskan kepada bagaimana seorang calon kepala daerah melakukan proses bargaining politik kepada petani tembakau dengan janji-janji politisnya untuk memberikan peningkatan kesejahteraan pada petani tembakau agar perolehan suara menjadi maksimal. Serta menjelaskan gerakan-gerakan petani melalui organisasi non pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

1.7 Kerangka Dasar Teori

Sebuah kebijakan dalam bentuk apapun tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat akan mengalami hambatan pada level implementasinya. Harrold Laswell dan Abraham Kaplan (dalam Dye:1981) berpendapat bahwa kebijakan publik

hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat. Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah;
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah;
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan;
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil;
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Suatu kebijakan publik yang telah mendapatkan resistensi dari masyarakat pada tahap *agenda setting*, *policy formulation* dan *decision making* maka

diprediksikan pada tahap selanjutnya, yakni implementasi pun akan mendapatkan respon buruk dari masyarakat.

1.7.1 Gerakan Protes Sosial

Gerakan protes sosial selalu memiliki potensi menjadi sebuah gerakan sosial. Gerakan protes sosial dapat diawali dari sebuah pembentukan gerakan sosial yang kemudian melakukan aksi protes sosial, namun protes sosial sendiri dapat menjadi awal mula terbentuknya gerakan sosial. Kaitan antara gerakan sosial dan protes sosial tidak dapat dilepaskan, oleh sebab itu perlu adanya telaah teoritik mengenai gerakan sosial.

Dari perspektif teoritik, dapatlah dirumuskan bahwa gerakan sosial adalah gerakan kolektivitas yang dilakukan sebagai reaksi atas struktur sosial, politik dan ekonomi yang dirasa tidak adil, timpang dan eksploitatif. Herbert Blumer (dalam Nugroho 2006: 8) mengartikan gerakan sosial sebagai berikut:

“Gerakan sosial adalah proses yang terjadi di luar realisme yang mapan serta termasuk tindakan kolektif. Dalam pemaknaan gerakan sosial, kolektivitas menjadi penting, sebagai kekuatan untuk mentransformasikan hubungan-hubungan sosial yang mapan atau untuk merubah hubungan-hubungan sosial yang melibatkan para partisipan.”

Faktor-faktor sosial yang menjadi sebab gerakan adalah adanya kesenjangan antara cita- cita/ harapan yang ingin dicapai dengan kenyataan sosial yang ada. Akumulasi kesenjangan sosial ini menyebabkan frustrasi sosial dan kekecewaan

sosial sehingga menumpuk menjadi bentuk kesadaran massa (kolektif) menentang struktur kekuasaan yang dianggap tidak adil. Dalam kaitan sebagai aksi massa kolektivitas, gerakan sosial berbeda dengan bentuk-bentuk protes sosial walaupun keduanya merupakan perilaku kolektif massa. Lofland (dalam Nugroho 2006:8) mengidentifikasi tipe-tipe protes sosial sebagai berikut:

“ Tipe-tipe protes sosial sebagai bentuk aksi massa yang terjadi karena munculnya faktor -faktor krisis dalam kehidupan kelompok sosial. Protes sosial dikaitkan dengan bentuk pernyataan pendapat yang disampaikan beramai-ramai yang umumnya berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, boikot, pemogokan atau keengganan melakukan sesuatu terhadap kekuasaan dan mengeluarkan deklarasi yang menolak gagasan di muka umum.”

Reaksi protes sosial terhadap keadaan yang dipersepsikan sebagai krisis oleh kelompok protes lebih spontan dan tidak terstruktur sebagaimana sebuah gerakan sosial. Namun demikian, sebuah aksi protes sosial dapat berubah menjadi bentuk aksi gerakan sosial manakala terdapat kondisi-kondisi objektif seperti kondisi makro politik berubah tidak menguntungkan kelompok protes, dan lain sebagainya. Beberapa varian gerakan protes menurut Lofland diantaranya:

1. *Crowd* dengan emosi dominan pada aspek kecemasan, ketakutan, panik, teror, perasaanterancam;
2. *Mass* dengan emosi dominan pada ekspresi kerusuhan kolektif, frustrasi mendalam, ketidakberdayaan, terdapatnya perasaan kepuasan emosi yang meluap-luap menuju pada kerusuhan (*riot*);

3. *Public* dengan emosi pada pemahaman sentimen umum yang relatif sama;
4. *Social movement* dengan emosi dominan pada tuntutan perubahan yang didahului pemahaman kolektif akan situasi politik yang tidak normal, krisis, ke mandegan yang merusak tatanan kelompok protes atau gerakan.

1.7.2 Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara umum dikaitkan dengan kegiatan masyarakat dalam proses pemilihan penguasa dan dalam proses pembentukan kebijakan publik, lebih dari itu partisipasi politik juga mencakup kegiatan-kegiatan yang berusaha mempengaruhi perubahan kebijakan publik yang telah dibuat.

Joan M. Nelson dan Samuel P. Huntington dalam *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* (1994: 6) mendefinisikan partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara (citizen) kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap, atau sporadis, secara damai, atau dengan kekerasan, legal, atau ilegal, efektif atau tidak efektif.”

Michael Rush dan Philip Althoff dalam bukunya *Pengantar Sosiologi dan Politik* (1993 : 23) mendefinisikan:

“Partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik”

Ramlan Subekti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik (1992 : 140) mendefinisikan:

“Partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya.”

Berdasarkan definisi-definisi partisipasi politik diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik yaitu usaha-usaha atau tindakan-tindakan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan merubah kebijakan yang menyangkut kehidupannya.

Aspek dari partisipasi politik menurut Nelson dan Huntington (1994) terdiri atas:

1. Mencakup kegiatan-kegiatan akan tetapi tidak sekedar sikap- sikap;
2. Kegiatan politikwarganegara;
3. Kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusanpemerintah.

Kegiatan yang demikian difokuskan terhadap pemerintah dan mereka yang pada umumnya dianggap mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dan mereka yang sangat mempengaruhi pengalokasian nilai-nilai secara otoritatif di dalam masyarakat. Dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan termasuk demonstrasi, pemogokan, pemboikotan dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi sebuah keputusan pemerintah yang dianggap merugikan kaum tertentu. Diantara orang-orang yang memberikan suara,

berdemonstrasi, melakukan protes, dan tindakan-tindakan lain yang tampak sebagai sebuah wujud partisipasi politik dengan tujuan mempengaruhi pengambil-pengambil keputusan (*decision maker*) ternyata terselip banyak kepentingan dan orang-orang yang memiliki tujuan diluar tujuan kolektif yang telah ditetapkan yang disebut dengan *free rider*.

Menurut Myron Wiener (dalam Andrias, 2009 : 61) paling tidak ada lima hal yang menyebabkan munculnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas. Kelima hal tersebut adalah:

a. Modernisasi

Komersialisasi pertanian, industrialisasi urbanisasi yang meningkat, penyebaran keterampilan baca tulis, perbaikan pendidikan, dan perkembangan media massa. Ketika masyarakat pada sebuah kota baru seperti buruh, pedagang dan kaum professional lainnya merasa bahwa mereka mampu untuk mempengaruhi nasib mereka sendiri, mereka semakin menuntut untuk ambil bagian dalam kekuasaan politik.

b. Perubahan-Perubahan Struktur Kelas Sosial

Munculnya kelas pekerja baru dan kelas menengah secara luas. Memberi penekanan pada peluang mengenai siapa yang berhak berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik yang memberi perubahan pada pola partisipasi politik.

c. Pengaruh Kaum Intelektual dan Komunikasi Massa Modern

Kaum intelektual seperti sarjana, filsuf, pengarang dan wartawan seringkali

mengemukakan gagasan-gagasan mengenai egalitarianisme dan nasionalisme kepada masyarakat. Kenyataan seperti ini pada akhirnya akan memberikan semangat bagi tuntutan akan partisipasi massa yang meluas dalam proses pembuatan keputusan politik. Komunikasi dan transportasi modern mempercepat bagi transfer gagasan tersebut kepada masyarakat. Melalui kaum intelektual dan komunikasi massa modern, gagasan tentang demokratisasi partisipasi menyebar ke berbagai belahan dunia termasuk negara-negara baru, negara dunia ketiga.

d. Konflik Diantara Kelompok Pemimpin Politik

Munculnya konflik dan kompetisi politik di tataran elit memungkinkan mereka untuk mencari dukungan kepada massa rakyat. Aktifitas mencari dukungan seperti ini pada gilirannya memunculkan gerakan persamaan hak. Dengan kata lain aktifitas mencari dukungan yang dilakukan oleh elit telah memaksa rakyat untuk memperjuangkan hak pilihnya.

e. Keterlibatan Pemerintah yang Meluas dalam Urusan Sosial, Ekonomi dan Kebudayaan

Perluasan bidang kegiatan pemerintahan memunculkan konsekuensi bagi tindakan-tindakan pemerintah yang menjadi kian menyentuh aktifitas masyarakat keseharian. Hal ini merangsang munculnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.

Partisipasi politik mengalami perkembangan seiring perkembangannya. Partisipasi politik saat ini tidak hanya terbatas pada keikutsertaan masyarakat dalam

memberikan suara pada pemilihan umum misalnya. Seiring bertumbuhnya kesadaran masyarakat dan keberdayaan masyarakat, menyebabkan masyarakat merasa bahwa mereka berhak memberikan suara dan terlibat dalam penentuan keputusan pemerintah yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ramlan Surbakti (1992) mengategorikan kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam tindakan partisipasi politik sebagai berikut:

Tabel 1.5

Tindakan Partisipasi Politik

Konvensional	Non Konvensional
<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Suara(voting) - DiskusiPolitik - KegiatanKampanye - Membentuk dan bergabung dalam kelompokkepentingan - Komunikasi individual dengan pejabat politik danadministratif 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengajuan Petisi - Berdemonstrasi - Konfrontasi - Mogok - Tindak kekerasan politik terhadap harta-benda (perusakan, pengeboman, pembakaran) - Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

Tindakan partisipasi politik dalam gerakan protes petani tembakau di Kabupaten Temanggung ini telah bersifat non konvensional dengan tindakan-tindakan yang sifatnya lebih kepada mempengaruhi kebijakan yang telah dikeluarkan dengan jalan demonstrasi, mogok, dan pembakaran. Kegiatan individu untuk

mempengaruhi pemerintah ada yang dilakukan atas kesadaran sendiri (otonom) juga yang dilakukan dengan desakan, manipulasi dan paksaan dari pihak lain (mobilisasi), seperti yang dicermati oleh Huntington dan Joan Nelson dalam risetnya di berbagai negara. Huntington dan Nelson (1994) dalam perspektif pembangunan politik melihat terjadi penolakan yang diametral antara partisipasi politik yang otonom dan yang termobilisasi (mobilize). Begitu banyak motif yang terdapat dalam sebuah partisipasi gerakan protes sosial dalam masyarakat. Partisipasi yang demikian dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi mobilisasi. Masyarakat tertentu dimobilisasi untuk turun ke jalan dan menentang sebuah kebijakan atau aturan tertentu dengan maksud terselubung. Dalam sebuah gerakan protes sosial jarang ditemui sebuah gerakan yang didasari oleh adanya keinginan individu secara pribadi. Kehadiran elemen-elemen penggerak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, politisi-politisi setempat, dan asosiasi-asosiasi tertentu turut memainkan peran penting dalam sebuah gerakan protes sosial. Beberapa studi secara eksplisif tidak menganggap tindakan yang dimobilisasikan atau yang dimanipulasikan sebagai sebuah partisipasi politik. Myron Wiener (dalam Nelson dan Huntington) mengatakan bahwa menjadi anggota organisasi, atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah, tidak termasuk partisipasi politik.

Milbrath (1977) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

- *Sejauh mana orang menerima perangsang politik*

Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam

kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusi formal.

- *Faktor karakteristik pribadiseseorang*

Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.

- *Karakteristik sosial seseorang*

Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

- *Keadaan politik*

Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang

totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang ramah, suka bergaul, dominan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

Studi ini mengemukakan, bahwa perilaku politik seseorang itu ditentukan oleh interaksi dari sikap sosial dan sikap politik individu yang mendasar. Asosiasi antara berbagai karakteristik pribadi dan sosial seseorang (seperti status sosioekonomis) dan tingkah laku politik adalah hasil dari motivasi sadar atau tidak sadar, atau kombinasi dari keduanya. Betapapun juga asosiasi ini tidak menyajikan penjelasan, juga tidak meletakkan suatu hubungan sebab-akibat, walaupun asosiasi lebih rendah berasosiasi dengan partai kiri, dan golongan yang berstatus lebih tinggi berasosiasi dengan partai kanan, tidaklah mengherankan.

1.7.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani Tembakau dalam Gerakan Protes Sosial

Partisipasi politik suatu masyarakat sangat mempengaruhi kondisi politik atau kebijakan pemerintah. Pada dasarnya kepedulian masyarakat terhadap apa yang

negara lakukan secara langsung akan meningkatkan kualitas sosial masyarakat itu sendiri. Hsin-chi dan Siu-kai (2004) dalam penelitiannya yang berjudul *“Institution and Political Participation in Three Chinese Societies”* menjelaskan betapa sosio demografi memainkan peran penting dalam partisipasi.

“Socio-demographic conditions are often regarded by social scientists as general and fundamental determinants of political attitudes and behavior. They are sometimes used as indicators of social cleavages. Socio-demographic variables denote individual-level of resources that can be converted into participatory actions. In our study design, these same variables but especially education and modernization represent the forces of development and modernization that enhance the skills and action orientations of citizens that tend to favor political participation.”

Dalam penelitian Hsin-chi dan Siu-kai (2004) disebutkan bahwa pendidikan memerankan peran penting dalam menciptakan orientasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam tindakan-tindakan politik.

Hal yang hampir serupa disampaikan dalam penelitian Nor, Gapor, Bakar, dan Harun (2011):

“To establish associations between political participation and socio-demographic factors: age groups, gender, ethnic background, education background, income levels, and party affiliation.”

Faktor demografi yang berpengaruh dalam partisipasi politik masyarakat adalah faktor umur, jenis kelamin, latar belakang etnis, pendidikan, status ekonomi dan afiliasi partai. Nor, Gapor, Bakar, dan Harun (2011) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa pendidikan dan status ekonomi individu berpengaruh positif pada partisipasi politik. Ada kecenderungan untuk individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan status ekonomi yang tinggi menyadari peran mereka sebagai warga negara dengan berpartisipasi dalam aktivitas politik. Mereka menggunakan kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas politik ketika mereka merasa bahwa partisipasi mereka diperlukan, terlebih ketika itu menyangkut kehidupan mereka.

Dalam penelitiannya yang membandingkan keterlibatan politik pada pria dan wanita, Verbs, Buns, dan Scholzman (1997) menyebutkan indikator keterlibatan politik yaitu ketertarikan politik (*political interest*), efikasi politik (*politic efficacy*), dan pengetahuan politik (*political knowledge*). Ketiga elemen tersebut dianggap saling berkaitan, individu yang memiliki ketertarikan dan informasi tentang politik, serta memiliki keyakinan (efikasi) bahwa partisipasinya akan berpengaruh terhadap kondisi mereka, maka akan lebih berpartisipasi secara lebih konkret, misalnya dengan demonstrasi.

Peneliti melakukan elaborasi terhadap beragam penelitian serta elemen partisipasi politik di atas, dan kemudian merumuskan partisipasi politik sebagai keterlibatan individu untuk mempengaruhi suatu kebijakan yang melibatkan elemen yaitu status ekonomi, tingkat pendidikan, luas kepemilikan lahan, ketertarikan politik (*political interest*) dan Efikasi Politik (*Political Efficacy*).

a. Status Ekonomi

Himpitan dan tekanan faktor-faktor sosial ekonomi seperti ancaman akan keberlangsungan kegiatan ekonomi suatu golongan tertentu (petani) akan turut mendorong para petani untuk melakukan aksi tuntutan atau protes sosial. Dengan munculnya kebijakan-kebijakan yang kurang pro-petani menjadikan posisi petani menjadi termarginalkan secara ekonomi. Proses marginalisasi, frustrasi sosial dan ketertekanan ekonomi tersebut adalah fase awal bagi munculnya sebuah gerakan protes sosial yang merupakan reaksi dari situasi yang dianggap tidak adil.

b. Tingkat Pendidikan

Faktor pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Pendidikan sangat berkaitan dengan pengalaman intelektual yang dimiliki seseorang, serta merupakan modal dasar dalam menentukan sikap dan tindakan. Kemampuan seseorang salah satunya dapat diukur dari tingkat pendidikannya. Kemampuan seseorang akan mempengaruhi pilihan-pilihan dan pertimbangan-pertimbangan individu tersebut dalam menentukan sebuah keputusan. Termasuk dalam menentukan apakah dirinya akan berpartisipasi dalam suatu gerakan atau tidak. Ajiswarman (1996) dalam Wicaksono (2010) menyatakan tingkat pendidikan mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap suatu hal yang baru. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin mudah baginya untuk menerima hal-hal baru yang ada di sekitarnya.

Miriam Budiardjo dalam *Dasar-dasar Ilmu Politik* (2008: 369) mengatakan

bahwa :

“Partisipasi politik erat sekali kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah. Perasaan kesadaran seperti ini dimulai dari orang yang berpendidikan.”

Semakin tinggi tingkat pendidikan petani tentu ia akan memiliki kesadaran lebih dalam menentukan nasibnya. Cara pandanginya pun akan berbeda ketika merespon suatu kondisi di luar lingkungannya yang mengancam dirinya. Dengan kesadaran tersebut akan mempengaruhi tindakan-tindakan mereka dalam merespon ancaman yang ada.

c. Status Penguasaan Lahan

Pertanian tembakau disadari atau tidak membentuk stratifikasi sosial atau kelas-kelas petani yang beragam. Menurut Sastraatmadja (2010)*, berdasarkan kepemilikan tanah, petani dibedakan menjadi beberapa kelompok yaitu:

1. Petani buruh/ buruh tani, adalah petani yang sama sekali tidak memiliki lahan sawah;
2. Petani gurem, adalah petani yang memiliki lahan sawah antara 0,1 s/d 0,50 hektar;
3. Petani kecil, adalah petani yang memiliki lahan sawah 0,51 s/d 1 hektar;
4. Petani besar, adalah petani yang memiliki lahan sawah lebih dari satu hektar.

Menurut Dawan Rahardjo (1986 : 23), kelas-kelas petani yang ada dalam masyarakat pedesaan ada beberapa tingkat, yaitu:

1. Tuan tanah (*landlord*), yaitu petani yang memiliki lahan pertanian lebih dari 5,0 ha. Sebagian dari mereka mampu menggarap lahan dengan tenaga kerja keluarga atau dengan mempekerjakan beberapa buruh tani. Sebagian pula menyewakan (menyewakan dengan system bagi hasil) seluruh atau sebagian lahan itu kepada petanipenggarap;
2. Petani kaya, yaitu petani yang memiliki lahan antar 2,0 sampai 5 ha. Petani semacam ini ada kalanya juga menyewakan kepada orang lain karena tidak mampu menggarap semua lahan yangdimilikinya;
3. Petani sedang, yaitu petani yang memiliki lahan pertanian antara 0,5 ha sampai 2,0 ha;
4. Petani kecil, yaitu mereka yang memiliki lahan pertanian antara 0,25 ha sampai 0,5 ha;
5. Petani gurem, yaitu petani yang hanya memiliki lahan pertanian antara 0,10 sampai 0,25 ha;
6. Buruh tani,yaitu petani yang hanya memiliki lahan kurang dari 0,10 ha. Bahkan petani ini juga dapat digolongkan pada mereka yang tidak mempunyai lahan sama sekali.

d. Ketertarikan Politik

Tindakan aksi atau partisipasi politik suatu individu bergantung pada kesadaran kritis individu tersebut. Freire (2000) mendefinisikan kesadaran kritis sebagai berikut:

“Kesadaran kritis merupakan kesadaran yang lebih melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari “blaming the victims” dan lebih menganalisis. Untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat.”

Kesadaran kritis seseorang dapat terbentuk dari keterlibatan individu tersebut dalam organisasi atau dari *political disaffection*.

1. Keterlibatan Individu Dalam Organisasi

Semakin tinggi keterlibatan individu dalam organisasi maka akan cenderung menaikkan partisipasi politik individu tersebut. Keterlibatan dalam organisasi dapat menjadi implikasi dari tumbuhnya kesadaran kritis seseorang. Semakin tinggi keterlibatan individu dalam organisasi maka akan cenderung menaikkan partisipasi politik individu tersebut.

2. Political Dissaffection

Political Disaffection adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan perasaan negatif individu atau kelompok terhadap suatu sistem politik. Penyebab utama dari political disaffection ini dapat adalah media massa dan media cetak dimana seseorang dapat menemukan informasi atau berita-berita politik. Michael J. Robinson (dalam Bacha, 2008: 7) menyebutkan bahwa dengan banyaknya individu menyaksikan acara televisi, utamanya berita-berita politik, mereka mengalami keterasingan politik (*political alienation*). Keterasingan ini akibat melemahnya dukungan terhadap struktur-struktur politik yang ada di sistem politik seperti parlemen, kepresidenan, kehakiman,

partai politik, dan lainnya. Individu merasa bahwa struktur-struktur tersebut dianggap tidak lagi memperhatikan kepentingan mereka. Wujud keterasingan ini muncul dalam bentuk sinisme politik berupa protes-protes, demonstrasi-demonstrasi, dan huru-hara. Jika tingkat political disaffection tinggi, maka para individu atau kelompok cenderung memilih bentuk partisipasi yang non konvensional ini.

e. Efikasi Politik

Efikasi politik adalah keyakinan yang dimiliki seseorang bahwa aktivitas atau partisipasi politiknya memiliki pengaruh suatu saat nanti terhadap berbagai proses politik (McLeod, et.al., 1999 dalam Stauffer, Michael, dan Reid, 2007). Coleman dalam buku yang disunting Loader (2007) menyatakan bahwa efikasi politik adalah keyakinan individu bahwa secara efektif pemahaman serta aktivitas politiknya akan mampu mempengaruhi proses pemerintahan dan pemerintah akan merespon terhadap aktivitas tersebut.

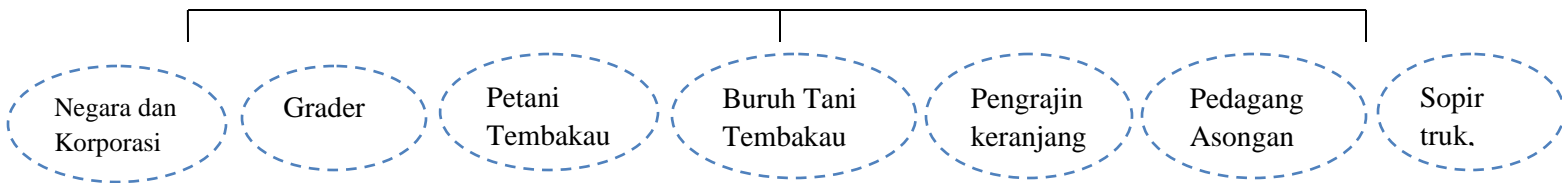
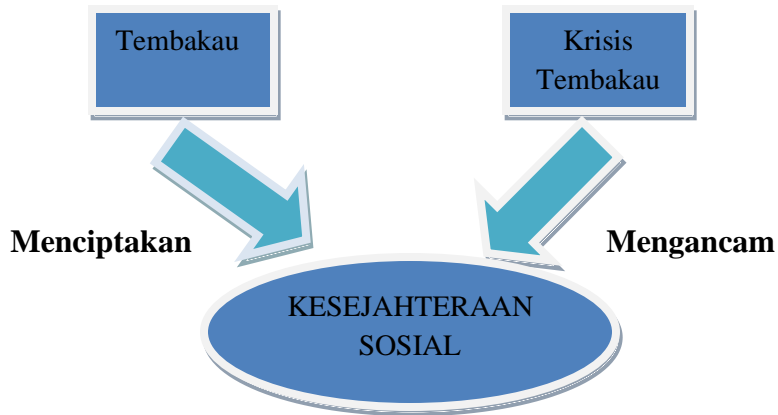
Keyakinan bahwa partisipasi politik individu dapat mempengaruhi suatu kebijakan tidak lahir begitu saja, pengalaman seseorang dapat menjadikan individu tersebut memiliki efikasi yang tinggi. Misalnya ketika muncul gelombang demonstrasi di suatu daerah oleh kelompok tertentu yang kemudian mampu merubah sebuah kebijakan, ini dapat menjadi sebuah pengalaman bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan hal yang sama di kemudian hari. Keyakinan seseorang bahwa partisipasi politiknya dapat membawa pengaruh pada kondisi pemerintahan akan membuat individu tersebut mau terlibat secara langsung dalam sebuah aksi

politik. Dengan demikian, efikasi politik menjadi salah satu faktor penting untuk mendorong seseorang terlibat dalam politik.

1.8 Kerangka Berpikir

1. Tembakau sebagai komoditas utama pertanian di Kabupaten Temanggung
2. *Multiplier Effect* Tembakau
3. Tembakau menghidupi 237.500 petani dan buruh tani
4. Temanggung sebagai Supplier tembakau utama nasional

1. Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
3. Ancaman impor tembakau dan kemunculan rokok putih

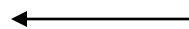
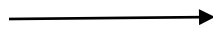


Ketidakpuasan Komunal

Faktor Internal :
 Tiingkat pendidikan,
 status ekonomi, status
 penguasaan lahan,
 kesadaran kritis, jenis
 pekerjaan pokok

Protes Sosial

Faktor Eksternal
 :LSM (Komunitas
 Kretek, Komisi
 Nasional Penyelamat
 Kretek, Liga
 Tembakau), APTI,
 Politisi Lokal, Tokoh
 Masyarakat



1.9 Operasionalisasi Konsep

Dimensi-dimensi yang digunakan untuk menjelaskan konsep penelitian, dalam penelitian ini meliputi:

1. Partisipasi politik adalah usaha-usaha atau tindakan-tindakan warga negara dalam membuat keputusan, melaksanakan keputusan, mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan merubah kebijakan yang menyangkut kehidupannya. Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa partisipasi non konvensional yang berupa demonstrasi, mogok dan pembangkangan pembayaran pajak
2. Tingkat status ekonomi petani adalah kedudukan seseorang atau keluarga dalam masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status ekonomi dapat dilihat dari pendapatan yang disesuaikan dengan harga barang pokok
3. Tingkat pendidikan masyarakat petani adalah tingkat atau jenjang atau jenjang keilmuan dan pengetahuan petani baik itu diperoleh melalui pendidikan formal maupun non-formal
4. Status Penguasaan Lahan adalah kedudukan petani berdasarkan kepemilikan lahan pertanian
5. Ketertarikan Politik adalah kesadaran untuk melihat struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat. Ketertarikan politik dapat terbentuk dan dipengaruhi oleh keterlibatan dalam organisasi dan mediainformasi.

6. Efikasi Politik didefinisikan sebagai rasa yakin seseorang bahwa aktivitas atau partisipasi politiknya memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan kebijakan. Efikasi politik dapat dibentuk oleh pengalaman individu itu sendiri dalam hal ini bagaimana individu tertarik untuk melakukan aktivitas yang telah dilakukan sebelumnya oleh kelompok tertentu dalam rangka merubah sebuah kebijakan yang tidakberkeadilan.

1.10 Metode Penelitian

Berdasarkan buku John W. Creswell (dalam *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* 2016 : 332) disebutkan bahwa metode penelitian melibatkan berbagai macam teknik pengumpulan, analisis, serta interpretasi data yang dikemukakan peneliti dalam kerja penelitiannya. Metode penelitian juga dikelompokkan menjadi tiga, yakni metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan *mix method* (campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif).

1.10.1 Desain Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Alasan mengapa menggunakan tipe penelitian kualitatif pada penelitian ini karena dianggap mampu menjawab fokus permasalahan serta peneliti ingin mendalami sekaligus mengukur fenomena situasi, proses, peristiwa dan interaksi yang terjadi di lapangan dengan menggunakan beberapa variabel dan indikator.

Menurut Creswell (dalam *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* 2009 : 175, 195 – 196) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam suatu fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dialami. Penelitian kualitatif penting dilakukan karena dapat mengungkap 6 (enam) hal, antara lain: a) memahami mendalami makna (*meaning*) tertentu, b) memahami dan mendalami konteks tertentu, c) mengidentifikasi segala fenomena yang belum diantisipasi, d) memahami fenomena yang terjadi di balik fenomena, e) mendeskripsikan penjelasan kausalitas, f) mendeskripsikan pola-pola yang ada.

Untuk mendapatkan data pokok dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam yang merupakan pendekatan metode kualitatif. Dengan melakukan wawancara mendalam diharapkan peneliti dapat menggali lebih dalam permasalahan yang diteliti.

1.10.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kabupaten Temanggung dipilih karena menjadi salah satu daerah dengan hasil komoditas perkebunan berupa tembakau terbesar di Jawa Tengah. Temanggung menjadi *supplier* tembakau nasional yang mampu menghidupi 237.500 petani dan buruh tani. Tetapi ditengah kenyataan tersebut, tembakau terbentur oleh berbagai macam aturan seperti halnya PP Nomor 81 Tahun 1999 tentang batasan tar dan nikotin dalam rokok serta PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Ancaman

bagi tembakau Temanggung sendiri adalah longgarnya impor tembakau untuk bahan baku pembuatan rokok putih yang dianggap rendah kadar tar dan nikotinnya daripada rokok kretek.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikanto (2006 : 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, jadi subjek penelitian merupakan sumber informasi atau pemberi informasi. Dalam Penelitian ini informan yang akan dipilih adalah sebagai berikut:

1. Bapak Gunadi selaku Staff Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai pendampingan dan inovasi kepada petani tembakau di Kabupaten Temanggung sebagai strategi penguatan komoditas pertembakauan di Temanggung ditengah kondisi tata niaga pertembakauan yang belum baik serta bagaimana proporsi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk petani tembakau di Temanggung.

2. Prof. Andreas Lako selaku Pengamat Ekonomi Jawa Tengah serta Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

Informasi mengenai peran tembakau sebagai penyokong perekonomian di Jawa Tengah serta *trend* permintaan tembakau di pasaran saat ini.

3. Bapak Irawan Prasetyadi selaku Wakil Bupati Temanggung Periode 2013-2018 sekaligus Calon Wakil Bupati Temanggung pada Pilkada Temanggung 2018.

Informasi mengenai bargaining politik kepada petani tembakau saat menjabat sebagai Wakil Bupati Temanggung maupun saat proses pencalonan di Pilkada Temanggung 2018.

4. Bapak Wibisono selaku Wakil Ketua Bidang Pemuda Olahraga dan Komunitas Seni Budaya PDIP Cabang Temanggung sekaligus putra dari Bapak Bambang Sukarno selaku Bupati Temanggung Periode 2013-2018 dan Calon Bupati Temanggung pada Pilkada Temanggung 2018.

Informasi mengenai bargaining politik kepada petani tembakau saat menjabat sebagai Bupati Temanggung maupun saat proses pencalonan di Pilkada Temanggung 2018 serta tanggapan mengenai keberjalanan RUU Pertembakauan.

5. Bapak Agus Parmuji selaku Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI).

Informasi mengenai kinerja APTI Nasional dalam memperjuangkan kepentingan petani Tembakau, salah satunya petani tembakau di Temanggung melalui advokasi, negosiasi dan lobbying yang tingkatnya

Nasional serta berhubungan langsung dengan kementerian atau lembaga terkait sebagai contoh mengenai UU Pembatasan Impor Tembakau.

6. Bapak Nurtantio Wisnu Brata selaku Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Tengah (DPD APTI Jateng).

Informasi mengenai peran APTI Jateng dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau Temanggung khususnya dalam lingkup Jawa Tengah melalui advokasi, negosiasi dan lobbying kepada Gubernur Jawa Tengah beserta jajarannya,

7. Bapak Nur Ahsan selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Temanggung (APTI Temanggung).

Informasi mengenai peran APTI Temanggung dalam mengakomodir kepentingan petani tembakau Temanggung sekaligus penjabaran mengenai sistem kemitraan petani dengan Industri Rokok Djarum di Temanggung.

8. Bapak Yamuh selaku Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Temanggung (APTI Temanggung).

Informasi mengenai peran APTI Temanggung dalam membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas tembakau Temanggung serta bagaimana solusi yang efektif untuk mempertahankan tembakau Temanggung sebagai komoditas yang dapat terus menguntungkan petani.

9. Bapak Zulvan selaku Ketua Liga Tembakau dan Mantan Ketua Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK).

Informasi mengenai peran Liga Tembakau dan KNPK dalam membantu seluruh sektor industri tembakau (mulai dari petani, buruh tani, pengrajang, pembuat keranjang) melakukan edukasi dan advokasi kepada pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraannya.

10. Bapak Medi selaku Ketua Kemitraan petani tembakau Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai tujuan dari dibentuknya sistem kemitraan petani tembakau di Temanggung dan bagaimana cara kerja sistem kemitraan petani tembakau tersebut dalam meningkatkan produksi tembakau di Temanggung.

11. Bapak Yanto selaku Koordinator Kemitraan petani tembakau Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai bagaimana proses pendampingan pola kemitraan kepada petani tembakau di wilayah Kecamatan Kledung untuk menghasilkan tembakau yang unggul baik secara kualitas maupun kuantitas.

12. Bapak Rochman selaku mantan aktivis yang tergabung dalam Gerakan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai efektivitas gerakan APTI dalam memperjuangkan kepentingan petani tembakau di wilayah Kabupaten Temanggung serta bagaimana sikap pemerintah saat ini kepada petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

13. Bapak Mangku selaku Petani Tembakau Kemitraan di Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai bagaimana dampak secara kualitas serta kuantitas yang dirasakan oleh petani dengan bergabung dalam pola kemitraan petani tembakau dan bagaimana sistem pembelian yang dilakukan oleh PT. Djarum sebagai industri yang menginisiasi pola kemitraan petani tembakau di Kabupaten Temanggung.

14. Bapak Sumari selaku Petani Tembakau Non-Kemitraan di Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai siapa yang berkewajiban menentukan harga tembakau di Kabupaten Temanggung, bagaimana sistem pembelian yang dilakukan oleh industri rokok Gudang Garam, serta bagaimana peran serta pemerintah dalam memberikan subsidi kepada petani tembakau.

15. Ibu Ambar selaku Petani Tembakau Non-Kemitraan di Kabupaten Temanggung.

Informasi mengenai siapa yang berkewajiban menentukan harga tembakau di Kabupaten Temanggung, bagaimana sistem pembelian yang dilakukan oleh industri rokok Gudang Garam, serta bagaimana sikap politis industri rokok Gudang Garam pada petani tembakau menjelang Pilkada berlangsung.

1.10.4 Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data berupa:

1. Kata-kata dan tindakan

Dalam hal ini, kata-kata dan tindakan diperoleh melalui proses wawancara yang dapat dicatat tertulis, rekaman, maupun video hasil pengamatan. Pencatatan sumber data ini dilakukan secara sadar dan terarah dengan memperhatikan tujuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan fokus permasalahan penelitian. Kata-kata dan tindakan merupakan salah satu sumber informasi yang nantinya akan diterjemahkan oleh peneliti menjadi sebuah kesimpulan sehingga dapat digunakan untuk menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis digunakan untuk menjadi bahan referensi tambahan yang berasal dari jurnal, arsip, dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Sedangkan dalam penelitian terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Data berupa fakta, informasi yang diperoleh langsung atas pertanyaan atau informasi dari lapangan. Data yang digunakan berupa data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu dengan wawancara. Secara kualitatif, data tersebut diperoleh melalui

wawancara yang dilakukan kepada informan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 15 narasumber yang terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat.

Untuk mengetahui mengenai politik ekonomi tembakau lebih mendalam, awal mula peneliti melakukan wawancara kepada petani tembakau non kemitraan. Untuk inovasi yang dilakukan agar tembakau Temanggung tetap unggul, peneliti melakukan wawancara kepada Ketua Kemitraan petani tembakau Kabupaten Temanggung, Koordinator Kemitraan petani tembakau Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung dan petani tembakau kemitraan.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada aktor-aktor yang terlibat dalam penelitian. Untuk mengetahui mengenai gerakan-gerakan yang dilakukan petani tembakau dalam melakukan advokasi serta pendidikan politik peneliti melakukan penelitian kepada Dewan Pimpinan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI), Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Jawa Tengah (DPD APTI Jateng), Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Temanggung (Sekjen APTI Temanggung), pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Temanggung (APTI Temanggung), Ketua Liga Tembakau, dan mantan aktivis Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Temanggung (APTI Temanggung). Peneliti melakukan wawancara dengan aktor-aktor yang sesuai dengan judul penelitian yakni politik

ekonomi pertembakauan bersama akademisi, dimana akademisi dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Pengamat Ekonomi Jawa Tengah dari Universitas Katholik Soegijapranata Semarang. Untuk aktor pemerintah peneliti melakukan pengambilan data dan wawancara kepada Staff Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA), dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Temanggung. Untuk aktor yang terlibat dalam pembuatan regulasi mengenai pertembakauan di Temanggung peneliti melakukan wawancara kepada calon Wakil Bupati Temanggung periode 2018-2024 dan putra calon Bupati Temanggung periode 2018-2024, tetapi kedua aktor tersebut gagal di Pilkada periode tersebut meskipun sudah berhasil menjabat menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Periode 2013-2018.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain dan tidak didapat secara langsung. Data berupa informasi dan fakta yang didapat dari buku-buku, jurnal, laporan atau artikel yang sebelumnya sudah diteliti oleh orang lain yang berhubungan dengan topik penelitian.

1.10.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini, peneliti memilih jenis

penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

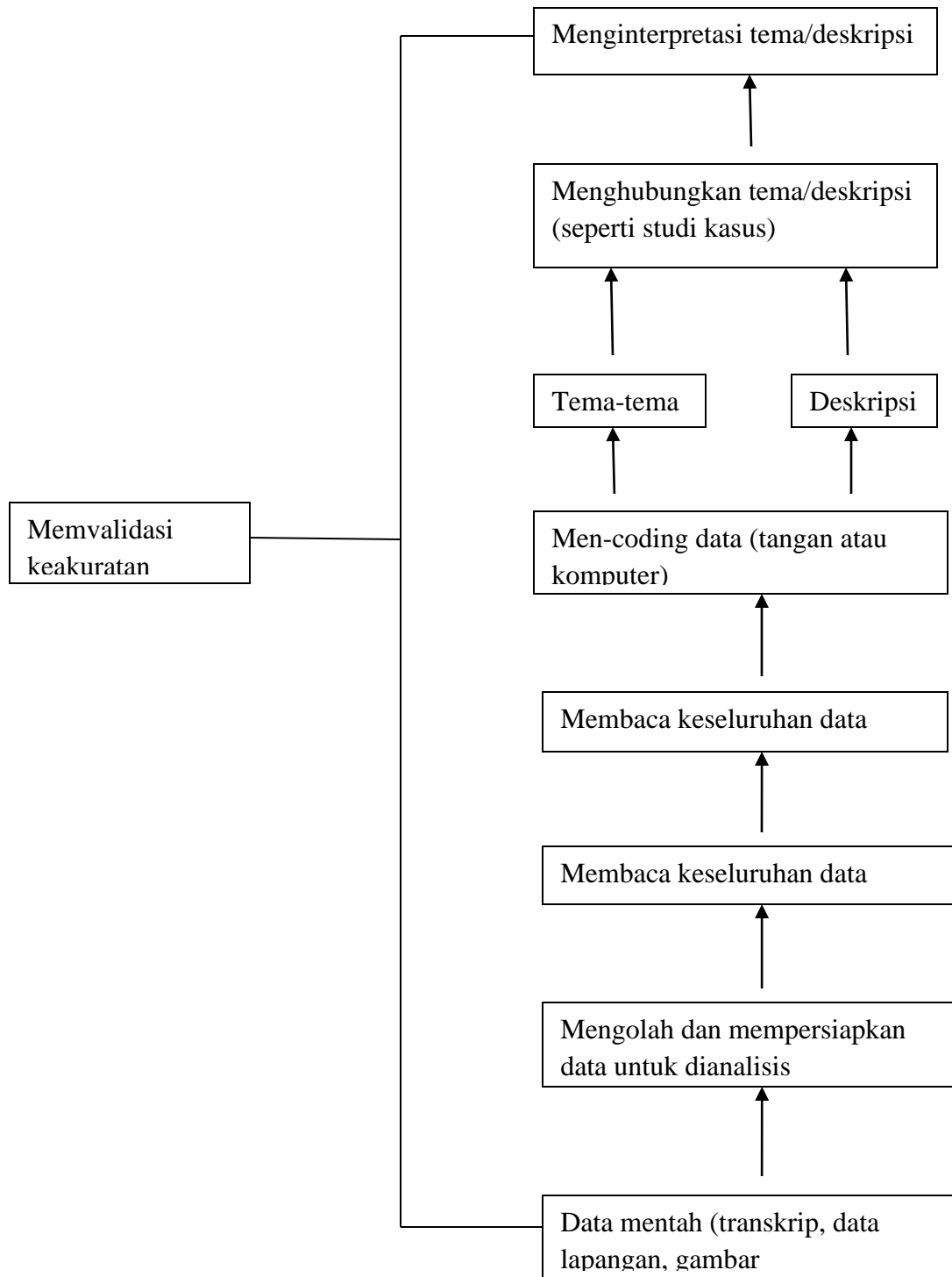
1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada sumber informan secara *face to face*. Dalam wawancara ini peneliti memberikan sebuah pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk mencari fakta-fakta atau informasi yang dibutuhkan peneliti sebagai bahan dan data agar dapat memberikan penjelasan tentang fokus penelitian.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan cara mencari dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Data tersebut berupa jurnal, arsip-arsip, buku literatur, buku akademis atau sumber dari media massa maupun elektronik.

1.10.6 Analisis dan Interpretasi Data



Sumber: John W. Creswell (277)

1.10.7 Kualitas Data

Untuk teknik validasi data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data. Menurut Maxwell (dalam *Qualitative Research Design: An interactive approach. Thousand Oaks, CA: Sage*1996: 93-94) teknik triangulasi adalah “collecting information from a diverse range of individuals and setting, using a variety methods” yakni suatu teknik yang digunakan untuk memastikan keabsahan atau kesahihan data melalui *cross check* antara informan yang satu dengan informan lainnya atau bisa juga menggunakan variasi metode lain, seperti membandingkan informasi dari informan dengan fakta atau data yang ditemukan melalui observasi dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, ada 3 yaitu:

1. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara.

2. Triangulasi Sumber Data

Menggali kebenaran informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Dapat menggunakan sumber data seperti dokumen, arsip, catatan resmi yang merupakan lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Masing-masing cara tersebut akan menghasilkan bukti dan selanjutnya akan memberikan pandangan

mengenai fenomena yang diteliti sehingga menghasilkan keluasan pengetahuan.

3. Triangulasi Teori

Hasil dari penelitian kualitatif yang menghasilkan sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut diselaraskan dengan perspektif teori yang relevan. Triangulasi teori ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam atas hasil analisis data yang diperoleh.